Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Dari Bandar Niaga ke Kota Kolonial: Dinamika Sejarah Perkembangan dan Ruang Masyarakat Makassar (Abad ke-16–18)

Novia
UIN Sunan Ampel Surabaya
03020223043@uinsa.ac.id
Nuriyadin
UIN Sunan Ampel Surabaya
nuriyadin@uinsa.ac.id

Abstrak: Kota Makassar merupakan bandar niaga penting di kawasan Indonesia Timur yang mengalami perubahan drastis pasca-Perjanjian Bongaya 1667. Kendati studi sejarah makro mengenai Makassar telah banyak dilakukan, kajian yang membedah dinamika spasial dan segregasi sosial masyarakat akibat penetrasi kolonial secara spesifik masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik Makassar sebagai bandar niaga masa Kesultanan Gowa-Tallo, proses transformasi tata ruang pada masa kolonial, serta dampaknya terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat. Menggunakan metode sejarah kritis (heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi) dengan pendekatan sejarah perkotaan (*urban history*) dan teori kota dualistis, penelitian ini bertumpu pada sumber primer berupa arsip *Dagregister* VOC, *Memorie van Overgave*, serta peta kartografi kolonial abad ke-17 dan ke-18. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi Makassar memicu lahirnya segregasi keruangan yang ketat melalui konsep kota dualistis, memisahkan pusat benteng kolonial (Fort Rotterdam dan permukiman Vlaardingen) dengan permukiman etnis lokal (kampung-kampung etnis). Transformasi ini tidak hanya mengubah lanskap fisik kota dari pelabuhan terbuka menjadi ruang monopoli terlokalisasi, tetapi juga memicu restrukturisasi kelas sosial dan pola adaptasi spasial masyarakat Makassar yang jejaknya masih bertahan hingga tata ruang kota modern saat ini.
Kata Kunci: *Makassar, bandar niaga, kota kolonial, sejarah perkotaan, transformasi spasial*

PENDAHULUAN

Kota pelabuhan menempati posisi khusus dalam sejarah Nusantara. Ia bukan sekadar tempat bongkar muat barang, tetapi ruang pertemuan pedagang, penguasa, dan komunitas dari berbagai asal yang bersama-sama membentuk wajah sosial dan fisik kota. Di antara kota-kota pelabuhan tersebut, Makassar menempati tempat yang menonjol. Sejak abad ke-16, pelabuhan ini tumbuh menjadi simpul perdagangan yang menghubungkan Nusantara bagian timur, terutama Maluku sebagai penghasil rempah, dengan jaringan niaga Asia Tenggara dan dunia luar (Andaya, 1981). Pertumbuhan itu

berlangsung di bawah Kesultanan Gowa-Tallo, kerajaan kembar Makassar yang menjadikan keterbukaan pelabuhan sebagai kebijakan dasar.

Titik balik terjadi pada pertengahan abad ke-17. Kekalahan Gowa dalam perang melawan VOC yang bersekutu dengan Arung Palakka dari Bone berujung pada Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian itu tidak hanya mengakhiri hegemoni politik Gowa di Sulawesi Selatan, tetapi juga mengubah kedudukan Makassar dari bandar niaga yang terbuka menjadi pos perdagangan di bawah kendali kolonial. Perubahan status politik ini berjalan seiring dengan perubahan ruang: benteng, permukiman, dan pembagian wilayah kota disusun ulang mengikuti kepentingan VOC.

Historiografi Makassar sudah cukup kaya. Karya Poelinggomang mengenai perdagangan maritim abad ke-19, studi Sutherland tentang Makassar sebagai *emporium* dan *company town* abad ke-18, kajian Reid tentang kebangkitan Makassar, serta studi Andaya tentang Sulawesi Selatan abad ke-17 telah memberi pemahaman luas tentang dinamika politik dan ekonomi kota ini (Poelinggomang, 2002; Sutherland, 1989; Reid, 1983; Andaya 1981). Namun kajian-kajian tersebut umumnya bertumpu pada sejarah politik-ekonomi dan perdagangan. Ruang kota sebagai objek analisis, yakni bagaimana tata ruang berubah, bagaimana masyarakat dipisahkan dan ditempatkan dalam ruang menurut etnis, serta bagaimana masyarakat lokal merespons ruang yang dibentuk penguasa kolonial, masih lebih sering menjadi latar daripada pokok pembahasan. Di sinilah letak celah kajian (*gap*) yang hendak diisi artikel ini.

Pentingnya kajian ini juga bersifat praktis. Sejarah kota di Indonesia bagian timur jauh lebih sedikit digarap dibandingkan kota-kota di Jawa, padahal kota seperti Makassar menyimpan lapisan sejarah yang tebal dan masih terlihat di ruang hidup sehari-hari. Memahami bagaimana ruang kota terbentuk membantu menjelaskan mengapa sebagian kawasan lama memiliki karakter berbeda, mengapa nama-nama kampung masih bertahan, dan bagaimana warisan kolonial berkelindan dengan warisan kerajaan lokal dalam wajah kota hari ini. Dengan kata lain, sejarah ruang bukan hanya urusan masa lalu, tetapi juga bekal untuk membaca kota yang kini terus berubah.

Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana karakteristik Makassar sebagai bandar niaga pada masa Kesultanan Gowa-Tallo? *Kedua*, bagaimana proses transformasi tata ruang Makassar pada masa kolonial? *Ketiga*, bagaimana transformasi itu memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk respons spasial masyarakat lokal? Artikel ini berargumen bahwa Makassar

kolonial tidak cukup dipahami sebagai kota yang sekadar "dikuasai", melainkan sebagai kota dualistis yang ruangnya dibelah menurut kepentingan monopoli dan kategori etnis, sekaligus kota yang ruangnya terus dinegosiasikan oleh penghuninya melalui kampung-kampung etnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makassar sebagai Bandar Niaga pada Masa Gowa-Tallo

Gowa dan Tallo semula merupakan dua kerajaan bertetangga di pesisir barat daya Sulawesi yang kemudian bersatu dalam hubungan yang erat, dan dari persekutuan itu lahir kekuatan maritim yang berpusat di Makassar (Mattulada, 1998). Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, kerajaan ini menjalankan ekspansi ke wilayah sekitar dan menjadikan pelabuhannya titik temu perdagangan. Islam diterima oleh kalangan istana pada awal abad ke-17, dan penerimaan itu memperkuat hubungan dengan jaringan pedagang Muslim di Nusantara (Reid, 1993).

Ciri paling menentukan dari Makassar masa itu adalah kebijakan pelabuhan terbuka. Pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Melayu, Jawa, Cina, Portugis, Inggris, Denmark, dan lainnya, dapat berdagang di sana tanpa monopoli penguasa, selama mematuhi aturan pelabuhan dan membayar bea (Reid, 1983). Keterbukaan ini menarik pedagang yang tersisih oleh monopoli di tempat lain, terutama setelah VOC menguatkan cengkeramannya di Maluku dan Banda. Makassar menjadi tempat bertemunya rempah, beras, dan barang dagangan lain, sekaligus tempat peralihan bagi pedagang yang ingin menghindari pembatasan kompeni.

Secara keruangan, kota ini berkembang sebagai kota pantai yang dilindungi serangkaian benteng sepanjang garis pantai, dengan Somba Opu sebagai benteng utama dan pusat kekuasaan. Permukiman pedagang asing tidak dipusatkan dalam satu kawasan tertutup, tetapi berbaur di sekitar pelabuhan dan pusat kerajaan. Pedagang asing diberi ruang untuk menetap dan membangun loji, sehingga kota tumbuh sebagai kota multietnis. Dalam kerangka Lefebvre, ruang kota pada masa ini lebih dekat dengan ruang yang dibentuk oleh praktik perdagangan harian daripada ruang yang dirancang secara ketat dari atas.

Masyarakat bandar niaga ini tersusun berlapis. Di puncaknya berdiri kalangan bangsawan (*karaeng*) yang memegang kekuasaan politik dan sering pula terlibat langsung dalam perdagangan. Di bawahnya terdapat rakyat merdeka, sedangkan lapisan paling

bawah adalah mereka yang berstatus tergantung atau budak (*ata*), yang jumlahnya cukup berarti dalam rumah tangga dan kegiatan ekonomi Sulawesi Selatan (Mattulada, 1998). Struktur ini penting dicatat karena sesudah 1667 pola kebergantungan tersebut tidak hilang, melainkan bergeser mengikuti kepentingan baru. Para penguasa lokal tetap hadir, tetapi ruang geraknya dibatasi kompeni, sementara kelompok pedagang dan pelaut mencari jalan lain untuk mempertahankan kehidupan ekonominya.

Keberagaman penghuni bandar juga tampak dari keberadaan komunitas pendatang yang menetap cukup lama. Pedagang Melayu, misalnya, mendapat tempat dan kepercayaan penguasa Gowa, sementara pedagang Eropa dari beberapa bangsa membuka perwakilan dagang di sana. Kehadiran mereka menjadikan Makassar tidak sekadar pasar bagi hasil bumi, tetapi juga tempat bertukar informasi, teknologi pelayaran, dan keahlian persenjataan. Pergaulan semacam ini membentuk watak kosmopolitan kota yang kelak terkikis oleh pembatasan kolonial, namun tidak pernah hilang sepenuhnya dari ingatan kolektif masyarakatnya.

Perang Makassar dan Perjanjian Bongaya sebagai Titik Balik

Persaingan antara Gowa yang menganut perdagangan bebas dan VOC yang menuntut monopoli rempah menciptakan ketegangan yang berakhir dengan perang pada 1666–1669. VOC di bawah pimpinan Cornelis Speelman memanfaatkan perlawanan Arung Palakka dan para pengikutnya dari Bone yang menentang dominasi Gowa, sehingga perang ini juga merupakan konflik di antara kekuatan-kekuatan Sulawesi Selatan sendiri (Andaya, 1981). Perang ini bukan sekadar benturan antara pribumi dan Eropa, melainkan hasil kombinasi persaingan dagang dan kontestasi politik lokal.

Perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada 18 November 1667 mengikat Gowa dengan sejumlah ketentuan berat. Di antaranya, Gowa menerima kedudukan istimewa VOC dalam perdagangan, melepaskan klaim atas sejumlah wilayah taklukannya, dan harus mengusir pedagang Eropa lain (Patunru, 1983). Benteng Ujung Pandang diserahkan kepada VOC, kemudian dibangun kembali dan dinamai Fort Rotterdam. Pertempuran masih berlanjut, dan Somba Opu baru jatuh pada 1669. Sejak itu Makassar menjadi pusat kekuasaan VOC di Sulawesi Selatan, sedangkan kerajaan Gowa kehilangan posisinya sebagai kekuatan maritim utama.

Transformasi Tata Ruang: Benteng, Vlaardingen, dan Kota Dualistis

Setelah 1667, pusat gravitasi kota bergeser dari Somba Opu menuju Fort Rotterdam. Benteng ini menjadi simpul kekuasaan, gudang, dan administrasi kompeni. Di sebelah utara benteng tumbuh permukiman orang Belanda dan pegawai kompeni yang dikenal sebagai Vlaardingen, sehingga lahirlah inti kota kolonial yang tertata dan terlindungi (Sutherland, 1989). Pemindahan pusat ini adalah contoh nyata representasi ruang dalam pengertian Lefebvre: ruang kota dibayangkan dan disusun mengikuti logika pengawasan dan monopoli.

Pengaturan tersebut memperlihatkan ciri kota dualistis. Kawasan benteng dan Vlaardingen menjadi sektor kolonial yang diatur, sedangkan permukiman penduduk lain berada di luar inti itu dengan pengaturan yang berbeda. Perbedaan itu bukan hanya soal lokasi, tetapi juga soal akses terhadap perlindungan, fasilitas, dan pusat perdagangan. Perlu dicatat bahwa Makassar bukan kota kolonial yang dibangun dari nol seperti Batavia; ia merupakan kota yang sudah ada dan kemudian direstrukturisasi, sehingga lapisan ruang lama dan baru bertumpuk. Karena itu pembagian ruangnya lebih lentur daripada gambaran ideal tentang kota dualistis.

Fort Rotterdam sendiri layak dibaca sebagai teks ruang. Bangunan ini berakar pada benteng Gowa di Ujung Pandang, yang oleh VOC dibangun ulang dengan bastion-bastion bergaya pertahanan Eropa dan diberi nama baru (Patunru, 1983). Perubahan nama itu lebih dari soal administrasi. Ia merupakan tindakan simbolik untuk menghapus jejak penguasa lama dan menanamkan tanda kekuasaan baru pada tempat yang sama. Dalam kerangka Lefebvre, penamaan ulang ruang adalah bagian dari praktik menguasai ruang, karena siapa yang berhak menamai tempat biasanya adalah siapa yang berkuasa atasnya.

Konsekuensi lain dari penataan ini terletak pada hubungan antara benteng dan pelabuhan. Dengan menempatkan pusat pemerintahan dan gudang dagang berdekatan dengan dermaga, VOC mempersempit jarak antara kekuasaan dan perdagangan. Arus barang yang tadinya mengalir ke banyak titik di sepanjang pantai kini diarahkan melewati satu simpul yang mudah diawasi. Penataan seperti ini menjelaskan mengapa monopoli dapat dijalankan dengan sumber daya yang relatif terbatas: pengawasan ruang menjadi sarana pengawasan ekonomi.

Segregasi Etnis dan Lahirnya Kampung-kampung Etnis

Pengelompokan penduduk menurut asal-usul menjadi ciri penting Makassar kolonial. Orang Eropa dan pegawai kompeni tinggal di sekitar benteng, orang Cina menempati kawasan tersendiri yang kemudian dikenal sebagai kawasan pecinan, sedangkan orang Melayu, Bugis, dan Makassar menempati kampung-kampung yang terpisah. Kampung Melayu dan kampung-kampung lain yang berpenghuni kelompok tertentu menjadi contoh bagaimana asal-usul etnis dan peran ekonomi menentukan letak seseorang dalam kota.

Segregasi ini melayani kepentingan pengendalian. Dengan menempatkan kelompok-kelompok dalam wilayah yang jelas, kompeni lebih mudah menarik pajak, mengawasi perdagangan, dan mengatur gerak penduduk. Pada saat yang sama, kategori etnis yang tadinya cair mengeras seiring pembagian ruang. Orang Bugis, misalnya, yang di bawah Gowa merupakan salah satu kelompok pelaut dan pedagang aktif, berkembang menjadi komunitas yang makin terkait dengan kota melalui kampung dan jaringan perdagangannya sendiri. Proses ini memperlihatkan bahwa segregasi tidak hanya memisahkan, tetapi juga membentuk identitas kelompok.

Peran komunitas Cina patut disorot tersendiri. Dalam banyak kota kolonial Asia Tenggara, pedagang Cina bertindak sebagai perantara antara kompeni dan pasar lokal, dan Makassar tidak terkecuali (Sutherland, 1989). Kedudukan perantara ini memberi mereka ruang ekonomi yang cukup besar, tetapi sekaligus menempatkan mereka dalam kawasan tersendiri yang mudah diawasi dan dikenai pungutan. Dengan demikian, ruang pecinan memperlihatkan dua sisi sekaligus: kesempatan ekonomi dan keterbatasan gerak yang ditetapkan penguasa.

Komunitas Melayu mengalami pengalaman yang sebagian mirip tetapi tidak sama. Mereka telah lama dikenal sebagai pedagang dan memiliki hubungan baik dengan istana Gowa sebelum kedatangan VOC (Reid, 1993). Pada masa kolonial kelompok ini tetap bertahan sebagai komunitas dagang dan keagamaan dengan permukiman sendiri. Perbandingan antara komunitas Cina dan Melayu menunjukkan bahwa segregasi tidak memperlakukan semua kelompok secara seragam. Posisi ekonomi, kedekatan dengan penguasa, dan sejarah hubungan dengan kompeni membuat setiap komunitas mengalami pembagian ruang dengan cara yang berbeda.

Dari Perdagangan Bebas ke Monopoli Kolonial

Perubahan tata ruang berjalan seiring dengan perubahan sistem ekonomi. Makassar yang tadinya terbuka bagi berbagai pedagang menjadi pelabuhan yang berada di bawah pengawasan monopoli VOC, terutama atas komoditas rempah. Banyak pedagang yang sebelumnya memakai Makassar sebagai tempat berlindung dari pembatasan kompeni tersisih atau berpindah ke pelabuhan lain. Dalam perspektif ruang, pelabuhan terbuka yang tadinya tersebar berubah menjadi ruang perdagangan yang terpusat dan terawasi di sekitar benteng.

Meski demikian, Makassar tidak serta-merta mati sebagai pusat perdagangan. Studi Knaap dan Sutherland tentang abad ke-18 menunjukkan bahwa pelayaran dan perdagangan di Makassar terus berlangsung, termasuk perdagangan hasil laut, dan jaringan pedagang lokal tetap berperan. Perdagangan budak juga menjadi bagian dari ekonomi kota dan wilayah sekitarnya. Hal ini memperlihatkan bahwa monopoli kolonial berfungsi tidak sempurna dan meninggalkan ruang gerak bagi pelaku lokal. Pada abad ke-19, setelah kebijakan pelabuhan bebas diberlakukan pada pertengahan abad itu, Makassar kembali tumbuh sebagai pelabuhan penting di kawasan timur Nusantara. Dengan demikian, perjalanan Makassar bukan garis lurus dari keterbukaan ke monopoli, melainkan gelombang pembukaan dan penutupan yang terkait kebijakan kolonial.

Rangkaian perubahan berikutnya memperlihatkan bahwa struktur ruang yang terbentuk pada abad ke-17 dan ke-18 menjadi landasan bagi perkembangan kota di masa kemudian. Ketika pelabuhan bebas dibuka dan perdagangan meningkat, kota mengalami pertambahan penduduk dan perluasan wilayah permukiman (Poelinggomang, 2002). Memasuki awal abad ke-20, pemerintah kolonial memperkenalkan pengelolaan kota yang lebih modern melalui pembentukan pemerintahan kota (*gemeente*), disertai perencanaan permukiman, jalan, dan fasilitas umum (Basundoro, 2012). Perencanaan semacam itu cenderung memperkuat pembedaan lama antara kawasan elite dan kawasan penduduk pribumi, sehingga kesenjangan ruang tidak menghilang, melainkan mengambil bentuk baru yang lebih terencana.

Respons Spasial Masyarakat Lokal dan Jejak hingga Kini

Masyarakat lokal bukan penerima pasif tata ruang kolonial. Di luar inti benteng, kampung-kampung etnis berkembang sebagai ruang sosial yang dihayati penghuninya: tempat memelihara jaringan kekerabatan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan ekonomi

sendiri. Dalam bahasa Lefebvre, kampung-kampung ini adalah ruang representasional, yakni ruang yang dimaknai dan diubah penghuninya meski berada dalam batas yang ditentukan penguasa. Dengan memanfaatkan jaringan dagang dan kekerabatan, masyarakat lokal membangun ruang-ruang yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan kompeni. Ini adalah temuan analitis yang menggeser perhatian dari pembagian ruang oleh penguasa ke cara penghuni kota merespons pembagian itu.

Jejak transformasi ini masih terbaca dalam struktur Makassar modern. Fort Rotterdam masih berdiri dan menjadi salah satu penanda utama kawasan kota lama, sementara sebagian nama kampung dan pola permukiman di sekitar pusat kota mengingatkan pada pengelompokan lama menurut etnis dan fungsi. Kesinambungan ini menunjukkan bahwa ruang kota menyimpan lapisan sejarah yang dapat dibaca melalui peta, nama tempat, dan struktur permukiman.

Refleksi Teoretis: Menggabungkan Kota Dualistis dan Produksi Ruang

Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa kedua kerangka konseptual yang dipakai saling melengkapi. Konsep kota dualistis membantu menangkap struktur besar: ada sektor yang dirancang untuk kepentingan kolonial dan ada sektor yang dibiarkan tumbuh dengan pengaturan lebih longgar. Namun konsep ini cenderung melihat kota dari atas, dari sudut pandang pembagian yang tampak pada peta. Ia kurang peka terhadap kehidupan di dalam masing-masing sektor, termasuk cara penghuni memaknai dan mengubah ruangnya.

Di sinilah gagasan produksi ruang bekerja. Perbedaan antara ruang yang dibayangkan penguasa dan ruang yang dihayati penghuni memberi ruang analitis bagi respons masyarakat lokal. Peta kolonial menampilkan kampung sebagai bidang yang terbatas dan teratur, sedangkan pengalaman penghuni memperlihatkan jaringan kekerabatan, perniagaan kecil, dan praktik keagamaan yang melampaui garis batas di peta. Dengan menggabungkan keduanya, Makassar kolonial dapat dipahami sebagai kota yang terbagi, tetapi tidak sepenuhnya tertutup; sebagai kota yang dikuasai, tetapi tidak sepenuhnya dikendalikan.

Pembacaan ini juga mengingatkan pada keterbatasan sumber. Arsip VOC dan peta kolonial terutama merekam sudut pandang penguasa, sehingga suara penghuni kampung sebagian besar harus dibaca secara tidak langsung, misalnya melalui catatan pungutan, sengketa, dan keluhan yang sampai ke pejabat kompeni (Kuntowijoyo, 2013). Karena itu

klaim tentang respons spasial masyarakat lokal sebaiknya diajukan dengan hati-hati dan diperkuat dengan sumber lokal dan penelusuran lapangan pada tahap penelitian lanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. *Pertama*, pada masa Kesultanan Gowa-Tallo Makassar merupakan bandar niaga terbuka yang multietnis dengan ruang kota yang terbentuk oleh praktik perdagangan harian. *Kedua*, setelah Perjanjian Bongaya 1667 tata ruang kota disusun ulang di sekitar Fort Rotterdam dan Vlaardingen, melahirkan pembagian ruang yang bercirikan kota dualistis dan segregasi menurut etnis. *Ketiga*, perubahan ruang ini berjalan seiring pergeseran ekonomi dari perdagangan bebas menuju monopoli kolonial yang tidak sempurna, serta memicu respons spasial masyarakat lokal melalui kampung-kampung etnis sebagai ruang sosial yang mereka hayati.

Sumbangan artikel ini terletak pada penekanan pada ruang sebagai objek sejarah, bukan sekadar latar peristiwa politik dan ekonomi, serta pada perpaduan konsep kota dualistis dan produksi ruang untuk menangkap baik pembagian ruang oleh penguasa maupun respons penghuninya. Penelitian lanjutan dapat menelusuri secara lebih rinci kampung tertentu, misalnya melalui pembacaan peta berseri antarperiode, untuk melihat perubahan batas dan fungsi ruang secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Andaya, Leonard Y. *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.

Basundoro, Purnawan. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Mattulada. *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998.

Patunru, Abdurrazak Daeng. *Sejarah Gowa*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1983.southeast

Poelinggomang, Edward L. *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.

Reid, Anthony. "The Rise of Makassar". *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 17 (1983): 117–160.

Reid, Anthony. *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*. Vol. 2: *Expansion and Crisis*. New Haven: Yale University Press, 1993.

Sutherland, Heather. "Eastern Emporium and Company Town: Trade and Society in Eighteenth-Century Makassar". Dalam Frank Broeze (ed.), *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16th–20th Centuries*. Kensington: New South Wales University Press, 1989.

Arsip

Dadregister VOC (catatan harian kantor dagang) https://archive.org/details/vereenigde-oostindische-compagnie-voc-dagregister/531862/NA_2514/